

392/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

**PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS
KEGIATAN PERTAMBANGAN ILEGAL
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

ARIANTO GUNADI
20221410025



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS
KEGIATAN PERTAMBANGAN ILEGAL
DI KABUPATEN MAJALENGKA

Disusun oleh:

ARIANTO GUNADI

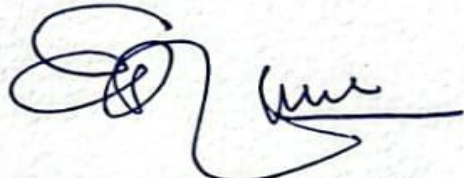
Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Hukum

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN PERTAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN MAJALENGKA

Disusun oleh:

ARIANTO GUNADI

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi
Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Dr. Anthon Fathanudien, S.H.,M.H.
NIK. 41010879147

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arianto Gunadi
NIM : 20221410025
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Majalengka** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,


Arianto Gunadi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah: 286)

“Di ragukan mengajarkan ketenangan, direndahkan menumbuhkan kekuatan. Dalam sunyi, proses dijalani dengan kesabaran dan rasa syukur, meski tampak berliku. Namun pada akhirnya, hasil akan menjadi bahasa paling jujur yang membungkam segalanya”

(Arianto Gunadi)

PERSEMBAHAN

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai tanda, hormat, bakti, rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan kepada:

1. Ibu Wati Susilawati selaku Ibu dari penulis, seorang perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat dalam kehidupan penulis, terimakasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, yang terus menerus tiada hentinya mendoakan, mendidik penuh kasih sayang dan memberi yang terbaik untuk penulis, panjang umur, tunggu hingga penulis membalas kebaikanmu;
2. Bapak Ebes Bastari yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta menjadi sumber motivasi dalam setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Kakak Bahtiar Gunawan, S.Kom yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan bantuan kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Nenek Kasminah tercinta yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini;
5. Sahabat, pendamping, sekaligus kekasih dari penulis, Sri Maulani S.H yang selalu setia menemani perjuangan penulis. Terima kasih atas segala doa, perhatian, yang telah diberikan. Di saat penulis merasa lelah menghadapi berbagai kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini hadir memberikan semangat, keyakinan, serta dukungan yang menguatkan;
6. Kepada Aditia sahabat sejak kecil yang ikut menemani dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada teman seperjuangan FH'22 yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini;
8. Kepada diri sendiri terima kasih atas ketekunan, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menyelesaikan skripsi ini. Berbagai tantangan, kelelahan, dan keraguan yang datang silih berganti, perjalanan jauh yang ditempuh setiap hari untuk menjadi orang sukses untuk membanggakan keluarga khususnya kedua orang tua terima kasih tetap memilih untuk melangkah dan tidak menyerah. Terima kasih sudah percaya bahwa segala usaha akan membuahkan hasil.

ABSTRAK

Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Majalengka. Oleh Arianto Gunadi, NIM. 20221410025, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Pertambangan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan bahan galian yang berasal dari dalam bumi, baik berupa mineral, batuan maupun sumber energi lainnya. Kegiatan ini mencakup proses panjang, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan hingga pasca tambang. **Tujuan penelitian** untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta implementasi penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal di Kabupaten Majalengka. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pemberian izin usaha pertambangan dibagi berdasarkan kewenangan wilayah, Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menegaskan pemegang izin usaha pertambangan dapat menolak mineral lain, serta kewenangan izin usaha pertambangan operasi produksi dibagi antara bupati/walikota, gubernur, dan menteri sesuai lintas wilayahnya, Pasal 67, 74, dan 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga menyebutkan pemberian IPR/IUPK oleh bupati/walikota dan Menteri serta sanksi pidana bagi penambangan tanpa izin hingga sepuluh tahun penjara dan denda sepuluh miliar rupiah. **Simpulan** regulasi yang ada sudah lengkap namun terkait implementasi masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi terutama dalam struktur dan budaya hukumnya. **Saran** upaya penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan lingkungan yang optimal bagi masyarakat serta keberlanjutan sumber daya alam di masa mendatang. Edukasi publik dan partisipasi masyarakat juga harus diperkuat guna mencegah praktik pertambangan ilegal berulang.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum, Pertambangan.

ABSTRACT

The Implementation of Environmental Law Enforcement on Illegal Mining Activities in Majalengka Regency by Arianto Gunadi, Student ID 20221410025, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

*Mining refers to all activities relating to the extraction, processing, and utilization of mineral resources derived from within the earth, including minerals, rocks, and other energy sources. These activities involve a long process, starting from general investigation, exploration, feasibility studies, construction, mining operations, processing and refining, transportation, and sales, up to post-mining activities. **The objectives of this research** are to identify, to analyze the regulation and implementation of environmental law enforcement against illegal mining in Majalengka Regency. **The research employs** an empirical juridical, utilizing primary, secondary, and tertiary data, which are collected through observation and interviews, and then analyzed qualitatively. **The finding indicates** that the regulation in a 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that “the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and shall be utilized for the greatest prosperity of the people.” Furthermore, Article 37 of Law Number 4 of 2009 regulates that the granting of mining business permits is divided based on regional authority. Article 40 paragraph (3) and Article 48 of Law Number 4 of 2009 affirm that holders of mining business permits may refuse other minerals, and that the authority for production operation mining permits is distributed among regents/mayors, governors, and ministers according to their respective jurisdictions. Articles 67, 74, and 158 of Law Number 4 of 2009 also stipulate the granting of IPR/IUPK by regents/mayors and the Minister, as well as criminal sanctions for mining without permits, with penalties of up to ten years of imprisonment and a fine of ten billion rupiah. **In conclusion**, although the existing regulations are comprehensive, there are still several obstacles in their implementation, particularly in terms of legal structure and legal culture. **The recommendations** of this study are to ensure legal certainty and to optimize environmental protection for the community, as well as the sustainability of natural resources in the future. Public education and community participation must also be strengthened to prevent the recurrence of illegal mining practices.*

Keywords: *Environmental Law, Law Enforcement, Mining.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih, dan karunia-Nya sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Majalengka”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir peneliti sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki pada saat penyusunan skripsi ini, sehingga segala kritik dan saran akan sangat berguna bagi penulis.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyadari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan banyak bimbingan, masukan, dan arahan sehingga banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumentini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H.,M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan ilmu, dan saran bagi peneliti dalam penyusunan skripsi;

7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan ilmu, dan saran bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
11. Bapak Acep Muztahidin, S.Ag. selaku Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
12. Bapak Iman, S.K.M., M.P.H selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
13. Bapak Yan Indra Sovhia, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
14. Bapak Iis Iskandar, S.IP., selaku Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
15. Bapak Aaf Muhammad Saeful Zaman, S.Pd. selaku Kepala Seksi Penyelidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

Kuningan, 19 Juni 2026

Arianto Gunadi
20221410025

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 11

1. Kegunaan Teoritis 11

2. Kegunaan Praktis..... 11

E. Kerangka Teori 11

1. Landasan Teori 11

2. Landasan Konseptual 14

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Penegakan Hukum 18

1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Tujuan Penegakan Hukum	20
3. Faktor Penegakan Hukum	22
B. Hukum Lingkungan	23
1. Pengaturan Hukum Lingkungan.....	23
2. Pengertian Hukum Lingkungan	25
3. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan.....	27
4. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	29
5. Asas-Asas Hukum Lingkungan.....	38
6. Teori Penegakan Hukum Lingkungan.....	41
C. Pertambangan.....	43
1. Pengertian Pertambangan	43
2. Jenis Pertambangan	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Spesifikasi Penelitian	53
B. Metode Pendekatan	53
C. Tahap Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpul Data	54
E. Alat Pengumpul Data.....	57
F. Analisis Data	57
G. Lokasi Penelitian.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pengaturan Mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Majalengka	60

B. Penerapan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Majalengka	95
BAB V PENUTUP	125
A. Simpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data pertambangan dengan izin resmi (legal) dan tanpa izin resmi (ilegal)	
Kabupaten Majalengka	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Majalengka Bapak Acep Muztahidin, S.Ag.....	154
Gambar 2	Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Bapak Yan Indra Sovhia, S.Sos., M.Si.....	155
Gambar 3	Wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Kepala Seksi Penyelidikan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka Bapak Iis Iskandar, S.IP Dan Bapak Aaf Muhammad Saeful Zaman, S.Pd.	155
Gambar 4	Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Bapak Iman, S.K.M., M.P.H	156